



# Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia

Ni Nyoman Kartika Yanti

STISIP Margarana Tabanan, Bali-Indonesia

Email Correspondence: [kartikayanti747@gmail.com](mailto:kartikayanti747@gmail.com)

**How to Cite:** Yanti, N. N. K. (2023). Literature Review: Kebijakan Publik terhadap Pengadaan Barang Modal Strategis Lembaga Pemerintah Indonesia. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2); 110-116. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.110-116>

## Abstract

*The faster Indonesia's and the world's economies grow, the greater the benefits to the government and society. Rapid growth, on the other hand, can lead to an increase in fraud. The implementation of electronic procurement is one of the government's policy reforms aimed at increasing the procurement of government goods and services (e-procurement). The goal of this research is to examine public policy regarding the acquisition of strategic capital goods for Indonesian government institutions. The research design for this qualitative study is a literature review. Agency theory was used to analyze this study. The findings demonstrate the importance of focusing on public policies with good governance by leveraging the potential of simple e-procurement to reduce fraud, which can have an impact on a country's level of corruption.*

**Keyword:** Public policy; procurement; goods; institutions; Indonesia

## Abstrak

Semakin cepat ekonomi Indonesia dan dunia tumbuh, semakin besar manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan yang cepat, di sisi lain, dapat menyebabkan peningkatan penipuan. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik merupakan salah satu reformasi kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-procurement). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan publik terkait perolehan barang modal strategis bagi institusi pemerintah Indonesia. Desain penelitian untuk penelitian kualitatif ini adalah studi literatur. Teori keagenan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Temuan menunjukkan pentingnya fokus pada kebijakan publik dengan tata kelola yang baik dengan memanfaatkan potensi e-procurement sederhana untuk mengurangi penipuan, yang dapat berdampak pada tingkat korupsi suatu negara.

**Kata Kunci:** Kebijakan publik; pengadaan; barang; institusi; Indonesia

## 1. Pendahuluan

Semakin besar laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan di seluruh dunia, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh pemerintah dan masyarakat. Namun, pertumbuhan yang cepat juga dapat menyebabkan peningkatan penipuan (*fraud*). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengkategorikan penipuan ke dalam tiga kategori: penyalahgunaan aset, pernyataan palsu, dan penyuapan (korupsi) (Hambani et al., 2021). Guna meminimalisasi penipuan tersebut, ditempuh dengan kebijakan pengadaan berbasis elektronik yang dineal dengan *e-procurement*. Dengan demikian, implementasi pengadaan secara elektronik merupakan salah satu reformasi kebijakan pemerintah di bidang *e-procurement* dan peningkatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Satu hal yang paling menonjol diantara tuntutan kebijakan publik di Indonesia adalah reformasi birokrasi dalam penghapusan berbagai jenis kecurangan, antara lain korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi kebijakan pemerintah dalam peningkatan pengadaan

barang dan jasa pemerintah ditempuh dengan penerapan *electronic procurement (e-procurement)*. *E-procurement* memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keterbukaan administrasi publik mengingat kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini. Menggunakan sistem pengadaan elektronik dalam membeli barang dan jasa untuk instansi pemerintah adalah contoh *e-procurement*. Pelelangan umum secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hanyalah salah satu contoh bagaimana instrumen ini memanfaatkan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi tersebut (Juniawan, 2021).

Laporan dari *Indonesia Procurement Watch (IPW)* ini menegaskan apa yang sudah diketahui banyak orang di Indonesia: bahwa proyek PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) adalah tempat kegiatan paling korup yang terjadi di Indonesia. Bukti untuk ini dapat ditemukan dalam laporan *Bank of England* yang mengevaluasi pembelian pemerintah. Laporan tersebut menyatakan bahwa tingkat kebocoran 10-50% terjadi dengan dana negara. Menurut IPW, tingkat korupsi yang dirasakan di Indonesia berkisar antara 10% hingga 30%. Dengan perkiraan Rp 600 triliun untuk seluruh pemerintah Indonesia, pejabat akan mencuri setidaknya Rp 100 triliun (BPPK, 2021).

Menurut Arsyam, efektivitas tata pemerintahan yang baik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dapat ditunjukkan melalui langkah-langkah seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan perhitungan anggaran. (Arsyam et al., 2016). Sektor pelayanan publik memainkan peran penting dalam menentukan kepercayaan publik terhadap aparat birokrasi dan, yang lebih penting, pada pemerintahan, sehingga hal ini menyoroti pentingnya inovasi dalam tata kelola, khususnya di sektor pelayanan publik. Penggunaan *e-procurement* untuk memperbarui dan meningkatkan layanan publik adalah contoh pemikiran inovatif (Nurlukman, 2018).

Pengadaan elektronik, atau *e-procurement*, adalah praktik melakukan semua tahapan proses pembelian secara online. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, keadilan, non diskriminasi, dan akuntabilitas pengadaan pemerintah, diterapkan *e-procurement*. Agar ada transparansi, harus ada parameter yang terdefinisi dengan baik, kontrak dan dokumen tender yang terstandarisasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus untuk menganalisis kebijakan publik terhadap pengadaan barang modal strategis lembaga pemerintah Indonesia.

## 2. Kerangka Teoritis

### *Teori Keagenan*

Dalam konteks teori keagenan, ketidaksepakatan antara agen dan prinsipal diklarifikasi. Sama halnya dengan perusahaan swasta, hubungan keagenan dapat ditemukan di instansi pemerintah. Dengan kata lain, pejabat publik adalah agen, dan masyarakat adalah prinsipal. Pejabat yang bertugas menjalankan negara menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan tugasnya. Tindakan oportunistik agen telah menyebabkan ketegangan antara mereka dan prinsipal mereka. Saat membuat pilihan, seorang agen hampir selalu mengutamakan kepentingan mereka sendiri atau kelompok mereka di atas kepentingan yang lebih besar. Untuk memajukan agenda mereka sendiri, agen menggunakan praktik korupsi seperti pencurian, penipuan, pilih kasih, dan pemerasan (Maria & Halim, 2021).

Prinsipal adalah pengambil keputusan yang mendelegasikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan semua keputusan dan arahan prinsipal. Investor dan prinsipal dana menuntut transparansi penuh mengenai penggunaan uang mereka dan keterlibatan mereka dalam operasi perusahaan. Untuk itu diperlukan laporan pertanggungjawaban manajemen ) (Yoanita & Farida, 2019). Publik atau masyarakat, dalam pandangan ini, adalah prinsipal, dan pemerintah, sebagai manajemen, adalah agen, yang tanggung jawab manajemennya termasuk menyediakan publik dengan laporan yang terbuka dan jujur tentang hasil

kebijakan dan tindakan pemerintah.

### ***E-procurement***

E-procurement telah dipuji sebagai salah satu sumber daya yang paling berguna untuk memperkuat e-government dan administrasi yang baik secara keseluruhan. Beberapa negara telah melihat peningkatan kualitas kelembagaan sebagai akibat dari pengenalan elektronik; pengadaan ini memungkinkan pengenalan kebijakan yang lebih luas, serta pelaksanaan pengadaan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat regional, nasional, dan internasional (Mélon & Spruk, 2020). E-procurement, atau pengadaan elektronik, digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan proses manajemen rantai pasokan di sejumlah industri yang berbeda. Namun, ini tidak terjadi di negara-negara di mana korupsi dan praktik tidak etis tersebar luas di sektor pengadaan. Alasan lain untuk mempelajari e-procurement secara rinci adalah bahwa hal itu dapat menjelaskan contoh korupsi dan perilaku tidak etis dalam proses pengambilan keputusan sektor publik (Aduwo et al., 2020).

### **3. Metode**

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai desain penelitiannya. Tinjauan pustaka adalah metode untuk menemukan, menilai, dan menafsirkan materi yang diterbitkan sebelumnya secara sistematis (Kesim & Yildirim, 2017). Dalam studi ini, 10 artikel yang diterbitkan dalam jurnal *peer-review* antara 2017 dan 2021 dianalisis untuk menentukan bagaimana berbagai lembaga pemerintah Indonesia mengevaluasi pengadaan barang modal strategis mereka. Selain itu, analisis pengolahan data deskriptif diterapkan pada studi ini digunakan untuk mencapai hasil penelitian dan pembahasan yang terpadu dan metodis.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini mengkaji 10 artikel jurnal guna mendapat pemahaman secara mendalam terkait pengadaan barang modal strategis di lembaga-lembaga pemerintah Indonesia.

**Tabel 1.** Literature Review Jurnal

No	Nama Peneliti & Tahun Terbit	Metode	Lembaga Pemerintah	Hasil Penelitian
1	(Ahmad et al., 2017)	Kuantitatif, regresi linier berganda	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Perkiraan harga memiliki pengaruh yang merugikan dan signifikan terhadap kualitas barang dan jasa yang diperoleh dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan.
2	(Adi, 2018)	Kualitatif, studi pustaka	SPSE Kementerian Keuangan Papua Barat	Kendala internal yang dimiliki oleh LPSE Kementerian Keuangan Papua Barat, kurangnya sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dan kurangnya pelatihan operasional SPSE. Kendala eksternal meliputi seringnya pemadaman listrik, kurangnya pengetahuan tentang penyedia dan panitia lelang, jaringan internet yang tidak memadai.
3	(Septiawan, 2018)	Kualitatif	Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat	Semua faktor penentu seperti organisasi, faktor teknologi, pemasok dan faktor pengguna secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem e-procurement

4	(Delmana, 2019)	Kualitatif	L/K di Indonesia secara umum	E-procurement dapat membantu mengurangi korupsi jika menganut prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang mencakup variabel pengendalian seperti pengawasan internal, penegakan hukum, dan peningkatan sarana, prasarana,
5	(Suliantoro & Ririh, 2019)	Kualitatif	Pemerintah daerah Jawa Tengah	Nilai penting dalam keberhasilan penerapan e-procurement adalah peran instansi itu sendiri
6	(Hartati et al., 2020)	Kualitatif	Pengadilan Agama Tegal	E-procurement merupakan metode yang optimal dalam pelaksanaan pengadaan karena lebih transparan, efektif, dan efisien.
7	(Nani & Ali, 2020)	Kualitatif	L/K di Indonesia secara umum	Manfaat e-procurement dijelaskan dari segi efisiensi biaya dan waktu bagi sektor publik sebagai penyedia.
8	(Nugroho & Zulkifli, 2020)	Kualitatif	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengadaan yang terbuka, kompetitif, dan berkeadilan berarti membuat informasi pengadaan mudah diakses oleh publik melalui e-procurement.
9	(Maria & Halim, 2021)	Kualitatif	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Semakin baik tingkat penerapan e-government, maka probabilitas terjadinya korupsi semakin rendah, dan demikian sebaliknya
10	(Sompotan et al., 2021)	Kualitatif	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung	Sistem e-procurement di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung mudah digunakan dan user friendly, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem e-procurement.

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Dalam konteks teori keagenan, ketidaksepakatan antara agen dan prinsipal diklarifikasi. Sama halnya dengan perusahaan swasta, hubungan *e-procurement* dapat ditemukan di instansi pemerintah. Dengan kata lain, pejabat publik adalah agen, dan masyarakat adalah prinsipal. Pejabat yang bertugas menjalankan negara menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan tugasnya. Tindakan oportunistik agen telah menimbulkan ketegangan antara prinsipal dan agen (Maria & Halim, 2021). Prinsip sistem *e-procurement* ini mendukung teori keagenan bahwa pejabat publik sebagai agen akan secara transparan dan akuntabel untuk melaporkan pengadaan barang atau jasa kepada prinsipal atau masyarakat.

*E-procurement* memiliki banyak keuntungan baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dan dapat digunakan sebagai demonstrasi akuntabilitas dan transparansi publik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin meningkat, dan kinerja pemerintah akan terdorong oleh temuan tersebut. Sistem e-kontrak untuk sektor publik sebagai pemasok membantu menjelaskan manfaat *e-procurement* dengan menghemat waktu dan uang sekaligus meningkatkan transparansi. Hal ini menunjukkan bagaimana *e-procurement* membantu instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan utama mereka, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Nani & Ali, 2020).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat bergantung pada keterbukaan informasi. Temuan studi ini menekankan pentingnya transparansi dan praktik tata kelola yang baik lainnya selama pembelian barang dan jasa (Cahyadi, 2018). Hal ini pula yang harus terdapat pada kebijakan *e-procurement* di setiap website instansi pemerintah. Sistem *e-procurement* adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang digunakan untuk menerapkan strategi *e-procurement* ke dalam tindakan dalam organisasi tertentu. Ada hubungan erat antara perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia dan pengguna, kebijakan,

tata kelola, proses, dan infrastruktur fisik bisnis. Dalam pengertian ini, peneliti mendefinisikan *e-procurement* sebagai proses dimana pemerintah memperoleh barang dan jasa secara elektronik (melalui internet, komputer, dan perangkat komunikasi lainnya) (Rachmat Hidayat, 2015).

*E-procurement* didasarkan pada kelemahan sistem akuisisi konvensional, yang berhubungan langsung dengan pihak pengadaan. Pengadaan secara elektronik hadir dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa dan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara efisien, efektif, adil, dan transparan. Kenyataannya, implementasi *e-procurement* masih menghadapi sejumlah tantangan. Artinya, penelitian harus dilakukan untuk menentukan bagaimana *e-procurement* dapat diterapkan pada setiap tahap dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan (Wijaya et al., 2010). Berdasarkan penelitian yang dijelaskan oleh Suliantoro dan Ririh di atas, niat organisasi dalam mempelajari teknologi mempengaruhi penggunaan *e-procurement*. Kemampuan atau kapasitas organisasi untuk memberikan kesempatan belajar individu akan mempercepat adopsi berbagai aplikasi *e-procurement*. Alhasil, keberhasilan penerapan *e-procurement* tidak lepas dari peran Lembaga (Suliantoro & Ririh, 2019).

*E-procurement* terkait erat dengan fungsi intinya sebagai sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, biaya rendah, dan transparansi interaksi antara pemerintah dan publik, pemerintah dan dunia usaha, dan lembaga publik itu sendiri. Selain itu, ada minat yang tumbuh dalam dampak ekonomi dan sosial dari e-government. Menurut peneliti, gambaran umum e-government, termasuk kemudahan TIK untuk mengakses layanan dan transaksi, dapat memiliki implikasi khusus untuk mencapai *e-procurement* publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa untuk mengurangi kecurangan, yang dapat berdampak pada tingkat korupsi suatu negara, perlu fokus pada tata kelola yang baik dengan memanfaatkan potensi *e-government* melalui sistem *e-procurement* yang ramah pengguna.

## 5. Simpulan

Kecurangan dalam pengadaan pemerintah semakin meningkat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pengadaan secara elektronik yang telah digunakan oleh beberapa instansi pemerintah merupakan salah satu cara untuk memerangi kecurangan pengadaan. Pengadaan secara elektronik yang telah digunakan oleh beberapa instansi pemerintah merupakan salah satu cara untuk memerangi kecurangan pengadaan. Kemampuan atau kapasitas organisasi untuk memberikan kesempatan belajar individu akan mempercepat penerapan berbagai sistem *e-procurement*. Peneliti berpendapat bahwa kemudahan penggunaan TIK untuk mengakses layanan dan transaksi *e-procurement* memiliki implikasi khusus untuk mencapai *e-procurement* publik yang efektif dan efisien. Kesimpulannya, untuk mengurangi penipuan, yang dapat berdampak pada tingkat korupsi suatu negara, perlu fokus pada tata kelola yang baik dengan memanfaatkan potensi *e-procurement* yang mudah digunakan.

## Daftar Pustaka

- Adi, C. S. W. (2018). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16>
- Aduwo, E. B., Ibem, E. O., Afolabi, A. O., Oluwumi, A. O., Tunji-Olayeni, P. F., Ayo-Vaughan, E. A., Uwakonye, U. O., & Oni, A. A. (2020). Exploring anti-corruption capabilities of e-procurement in construction project delivery in Nigeria. *Construction Economics and Building*, 20(1). <https://doi.org/10.5130/AJCEB.v20i1.6964>
- Ahmad, S. H., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi



- Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Di Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18620>
- Arsyam, D. M., Khaerah, N., & Hardi, R. (2016). Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Toraja Utara. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 5(1).
- Cahyadi, A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1792>
- Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purchasing Terhadap Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1). <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.241>
- Hambani, S., Warizal, W., Kusuma, I. C., & Ramadianti, R. (2021). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). *Jurnal Akunida*, 6(2). <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i2.3569>
- Hartati, S., Sugiharto, I., Fakhri, J., Siswadi, Wekke, I. S., Azhari, & Roslina. (2020). Implementation of government goods and services procurement using the e-purchasing method in the teal religious court: Mediating role of supply chain in Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 9(2).
- Juniawan, R. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. *Pencerah Publik*, 8(1). <https://doi.org/10.33084/pencerah.v8i1.2262>
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(1).
- Mélon, L., & Spruk, R. (2020). The impact of e-procurement on institutional quality. *Journal of Public Procurement*, 20(4). <https://doi.org/10.1108/JOPP-07-2019-0050>
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671>
- Nugroho, Y. S., & Zulkifli, Z. (2020). Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.32477/jrm.v6i2.22>
- Nurlukman, A. D. (2018). e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1). <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.264>
- Rachmat Hidayat. (2015). Local Government E-Procurement Practices in Indonesia: Accountability, Efficiency, and Barriers. *Journal of US-China Public Administration*, 12(2). <https://doi.org/10.17265/1548-6591/2015.02.003>
- Septiawan, B. (2018). Keberhasilan Implementasi Sistem E-Procurement pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.33603/jka.v2i1.1240>
- Sompotan, R. M. R., Mandey, S. L., & Saerang, I. S. (2021). Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Implementasi E-Procurement Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2). <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.605-618.2021>
- Suliantoro, H., & Ririh, K. R. (2019). Enhancing Usage Behavior of E-Procurement Through Organizational Values. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 18(1). <https://doi.org/10.23917/jiti.v18i1.7116>

- Wijaya, W. H., Indryani, R., & Putri, Y. E. (2010). Studi Penerapan E-Procurement pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. *ITS Master*.
- Yoanita, S., & Farida. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Independensi Auditor, Kompetensi, Due Professional Care, Objektivitas, Etika Profesi dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Fakultass Ekonomi Dan Bisnis, Jalan Tidar Ni 21 Magelang Jawa Tengah*, 289–301.